

KAPASITAS MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH KOTA (Studi Masyarakat Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok)

Lestario Widodo dan Joko Prayitno Susanto

Peneliti di Pusat Teknologi Lingkungan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Abatract

Principally, solid waste management is all activities of solid waste handling, from the point sources until the final disposal. Up to know solid waste management in urban area is still a complex problem, either from social, management, and technology aspects. The other problem of solid waste management is due to the people behaviour, which is mostly still unaware. Social capacity is another word social capital means a social condition that a lot of citizens participate the process of decision making or policy making and cooperation with government. The role of community in this system is only in paying the monthly fee. So that people still fully gave the solid waste management system in to the government. There is no indication of solid waste sparation by the people them selves.

Key Words: *Community capacity, solid waste management*

1. LATAR BELAKANG

Keberadaan sampah terutama di wilayah perkotaan hingga saat ini masih menjadi masalah yang kompleks baik dari sisi sosial, managemen, dan teknologinya. Sampah kota sebagai bagian dari suatu siklus kehidupan modern adalah bahan yang dibuang oleh penduduk karena dinilai sudah tidak berguna sehingga apa-bila dibiarkan dapat mencemari lingkungan hidup sekitarnya yaitu berupa bau yang tidak sedap, secara estetika merusak pemandangan dan dapat pula menimbulkan berbagai macam penyakit. Disamping itu pada musim hujan, sampah dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya banjir, karena masih kurangnya kesadaran masyarakat yang membuang sampah sembarangan ke lubang-lubang saluran air bahkan ke sungai-sungai disekitar pemukiman penduduk. Dengan kata lain perilaku masyarakat dalam membuang sampah masih tidak baik.¹⁾ Semakin

besar perkembangan suatu kota, semakin besar sampah yang dihasilkannya dan semakin besar pula masalah yang dapat timbul di kemudian hari. Didalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan pengelolaan sampah dimaksudkan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Lebih lanjut dalam UU tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Kemudian pemerintah kota/kabupaten berwenang menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria

yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan terbitnya UU No. 18 Tahun 2008 tersebut maka pengelolaan persampahan telah diatur dengan tegas terkait wewenang pemerintah, hak dan kewajiban, pembiayaan dan kompetensi, kerjasama dan kemitraan, peran serta masyarakat, larangan, pengawasan, sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, penyidikan dan ketentuan pidananya. Kapasitas masyarakat yang pada hakekatnya adalah suatu kondisi dimana masyarakat secara aktif berperan serta didalam mengambil keputusan dan kebijakan serta mampu bekerjasama dalam pengelolaan sampah, diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang sadar akan arti pentingnya pengelolaan sampah.⁴⁾

Untuk mengetahui sejauh mana peran masyarakat terhadap pengelolaan sampah, maka dilakukan survei langsung kepada masyarakat di wilayah kota Jakarta dan sekitarnya.

2. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah :

Observasi, yaitu pengumpulan data dan fakta yang berhubungan dengan masalah sampah yang dilakukan dengan melihat, mendengarkan dan mengamati secara langsung di lokasi penelitian. Melakukan wawancara (*interview*), yaitu tanya jawab secara lisan yang dilakukan langsung dengan masyarakat, dengan alat bantu daftar pertanyaan. Jumlah sampel masyarakat yang menjadi responden adalah 307 yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Bekasi dan Depok. Survei ini mencakup jenis sampah, pemisahan sampah, iuran atau retrebusi sampah, serta persepsi masyarakat terhadap pemulung, dengan alat bantu berupa daftar pertanyaan. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi karakteristik dari fenomena yang diamati atau melakukan eksplorasi kemungkinan hubungan dua atau lebih fenomena. Informasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran

yang jelas tentang sampah dan kapasitas masyarakat dalam mengelola sampah, sehingga dapat diantisipasi kebijakan operasinal pengelolaan sampah secara terpadu. Penelitian dilaksanakan oleh Pusat Teknologi Lingkungan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) bekerjasama dengan Universitas Nagoya Jepang pada tahun 2008 dengan rincian responden adalah sebagai berikut ; responden Jakarta sebanyak 167 orang, responden Depok 30 orang, responden Tangerang 50 orang dan responden Bekasi adalah 60 orang.

3. GAMBARAN UMUM RESPONDEN

Dari hasil wawancara dengan responden, maka diperoleh gambaran umum masyarakat yang menjadi responden yang meliputi jenis kelamin, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, dan penghasilan.

Dari 307 responden masyarakat, 56% adalah berjenis kelamin laki-laki dan 44% perempuan. Secara lebih jelas responden berdasarkan jenis kelamin terlihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	%
Laki-laki	172	56
Perempuan	135	44

Sumber : Data primer 2008

Apabila dilihat dari jenis pekerjaan, maka sesuai dengan karakter masyarakat kota, jenis pekerjaan masyarakat yang menjadi responden sangat beragam yaitu sebagai karyawan swasta, pegawai negeri, wiraswasta, mahasiswa/pelajar, dan hanya 21% responden yang mengaku tidak bekerja. Jenis pekerjaan responden secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pekerjaan Responden

Jenis Pekerjaan	Jumlah	%
1. Karyawan	63	20,7
2. Pegawai Negeri	31	10,2
3. Keahlian	14	4,6
4. Wiraswasta	62	20,4
5. Lainnya	53	17,4
6. Pelajar/Mahasiswa	15	4,9
7. Tidak Bekerja	66	21,7

Sumber : Data primer 2008

Demikian pula tingkat pendidikan responden, sebagai masyarakat kota responden yang berpendidikan SMA adalah 44%, dan yang berpendidikan sarjana sebesar 27,9%. Sedangkan responden yang tidak lulus SD hanya 1,7%. Gambaran tingkat pendidikan secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Pendidikan Responden

Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1. Tidak lulus SD	5	1,7
2. Lulus SD	34	11,4
3. Lulus SMP	45	15,1
4. Lulus SMA	131	44
5. Universitas	83	27,9

Sumber : Data primer 2008

Pada umumnya informasi yang paling sulit untuk diperoleh dari responden adalah tingkat penghasilan. Masyarakat biasanya segan untuk memberi informasi tentang penghasilan yang diperoleh tiap bulannya. Dari pengakuan responden, maka diperoleh informasi tentang tingkat penghasilan tiap bulannya seperti terlihat pada Tabel 4. Prosentasi terbesar yaitu 40,3 % pada tingkat penghasilan antara Rp 1.000.000 hingga Rp 3.000.000 ,-

Tabel 4. Penghasilan Responden

Tingkat Penghasilan Per Bulan	Jumlah	%
1. < Rp 1.000.000	83	27,9
2. Rp 1.000.000 < Rp 3.000.000	120	40,3
3. Rp 3000.000. < Rp 5.000.000	54	18,1
4. > Rp 5.000.000	41	13,8

Sumber : Data primer 2008

4. ASPIRASI MASYARAKAT

Aspirasi masyarakat responden terhadap sampah dilihat dari komposisi sampah yang dibuang, pemisahan sampah, iuran atau retrebusi sampah, keberadaan pemulung, dan kebijakan pengelolaan sampah. Secara umum, jenis sampah biasanya dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu sampah organik (biasa disebut sebagai sampah basah) dan sampah anorganik (sampah kering). Sampah basah adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti daun-daunan, sampah dapur, dan lain-lain. Sampah jenis ini dapat terdegradasi (membusuk/hancur) secara alami. Sebaliknya dengan sampah kering, seperti kertas, plastik, kaleng, dan lain-lain. Sampah jenis ini tidak dapat terdegradasi secara alami. Sebagian besar sampah yang dihasilkan di Indonesia merupakan sampah basah, untuk DKI Jakarta yaitu 55,37 persen sampah organik dan 44,63 persen sampah nonorganik.²⁾ Selain itu, terdapat jenis sampah atau limbah dari alat-alat pemeliharaan kesehatan. Beberapa diantaranya sangat mahal biaya penanganannya, karena berupa bahan kimia berbahaya, seperti obat-obatan, yang dihasilkan oleh fasilitas-fasilitas kesehatan. Namun demikian tidak semua sampah medis berpotensi menular dan berbahaya. Sejumlah sampah yang dihasilkan oleh fasilitas-fasilitas medis hampir serupa dengan sampah domestik atau sampah kota pada umumnya. Sementara sampah

hasil proses industri biasanya tidak terlalu banyak variasinya seperti sampah domestik atau medis, tetapi kebanyakan merupakan sampah yang berbahaya secara kimia. Dari hasil wawancara dengan responden diperoleh informasi bahwa jenis sampah yang dibuang umumnya adalah sampah organik yaitu 42,8 %, sedangkan sisanya adalah sampah kering seperti plastik, logam, pakaian, kaca dan lainnya. Komposisi sampah menurut pengakuan responden dapat terlihat seperti Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Urutan Berdasarkan Sampah Yang Dibuang

Jenis Sampah	Jml	%
1.Sampah Basah/Organik	281	42,8
2.Kayu / rumput & sejenisnya	67	10,2
3. Kertas/ Majalah/Kardus	113	17,2
4.Kantong Plastik&sejenisnya	160	24,4
5.Logam/Metal (kaleng/panci)	9	1,4
6. Kaca (botol/gelas dll)	9	1,4
7. Karet (ban dll)	5	0,0
8. Pakain Bekas	3	0,5
9. Baterai, Lampu	6	0,9
10. Peralatan listrik(tv,radio dll)	0	0,0
11.Sampah Besar (furnitur dll)	1	0,2
12. Selain itu	2	0,3
13. Tidak tahu	1	0,2

Sumber : Data primer 2008

Pemisahan sampah di sumber atau tingkatan masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk memudahkan pengelolaan sampah pada tahapan selanjutnya, sehingga dapat dengan lebih mudah mana yang dapat didaur ulang dan mana yang akan dijadikan kompos. Namun demikian himbauan untuk pemisahan sampah pada tingkatan masyarakat belum dapat direalisasikan. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan responden dimana yang sengaja memisahkan sampah basah dan kering hanya 4,3 %. Sisanya praktis tidak merancang pewardahan sampah secara terpisah. Perlakuan pemisahan sampah oleh masyarakat responden secara lebih jelas dapat terlihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Pemisahan Sampah

Perlakuan Sampah	Jumlah	%
1. Selalu dipisah	13	4,3
2. Kadang-kadang	116	38,2
3. Sangat jarang	56	18,4
4. Tidak dipisah	104	34,2
5. Tidak tahu	15	4,9

Sumber : Data primer 2008

Dalam penanganan sampah, aspek pembiayaan merupakan faktor yang menentukan terhadap keberhasilan pengelolaannya. Komponen utama dalam pembiayaan pengelolaan sampah meliputi biaya pengadaan kendaraan pengangkutan (truk dan gerobak), operasional dan perawatan kendaraan, tenaga kerja (sopir, penyapu jalan, pengangkut sampah, pengawas dan pegawai administrasi) serta sistem pembuangan akhir sampah. Jumlah kendaraan dan tenaga kerja sangat tergantung dari luasnya lokasi dan volume sampah yang dikelola serta kondisi TPS (Tempat Pengumpulan Sementara)

Penyusunan rotasi jadwal pengangkutan sampah yang tepat dapat menjamin terangkutnya semua sampah tepat pada waktunya, sampah yang tidak berserakan akan mempermudah tenaga pengangkut untuk melaksanakan pengosongan dan pembersihan TPS dari tempat sampah, adanya pemisahan antara sampah organik dengan sampah non-organik akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembuangan akhir sampah.

Masyarakat sebagai penghasil sampah mempunyai kemampuan untuk menekan biaya penanganan sampah kota melalui beberapa tindakan dan kegiatan yang sederhana yang dapat dilakukan di tiap rumah tangga. Ketertiban dan kedisiplinan masyarakat didalam pembuangan sampah seperti memisahkan sampah basah dan sampah kering dan membuang sampah pada tempatnya sehingga tidak berserakan. Disamping itu masyarakat umumnya telah menyadari bahwa pengelolaan sampah memerlukan biaya yang salah satu

kontributornya adalah berupa iuran atau retrebusi sampah. Besarnya iuran sampah tiap bulannya di tiap wilayah tidak persis sama. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat responden umumnya iuran sampah tiap bulan sekitar Rp 5.000 tiap Kepala Keluarga. Jumlah iuran sampah secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Besarnya Iuran Sampah

Iuran Sampah	Jumlah	%
1. < Rp 1.000 per bulan	63	20,5
2. < Rp 5.000 per bulan	69	22,4
3. < Rp 10.000 per bulan	47	15,3
4. < Rp 20.000 per bulan	6	1,9
5. > Rp 20.000 per bulan	5	1,7
6. Tdak tahu	60	19,5
7. Tdak membayar	57	18,7

Sumber : Data primer 2008

Keberadaan pemulung oleh masyarakat umumnya sering ditanggapi secara beragam baik itu positif maupun negatif. Pada kenyataannya jenis sampah yang dibuang oleh masyarakat pada dasarnya masih mempunyai nilai jual, sehingga tidak bisa dipungkiri akan kehadiran pemulung di tiap wilayah manapun. Tanggapan masyarakat responden terhadap keberadaan pemulung seperti terlihat pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Pendapat Masyarakat Terhadap Pemulung

Keterangan	Jumlah	%
1. Sangat diperlukan	126	19,6
2. Menyusahkan	148	23,0
3. Mengurangi keindahan kota	35	5,4
4. Suka mencuri selain sampah	172	26,7
5. Mengganggu keamanan	49	7,6
6. Kasihan	40	6,2
7. Lebih baik tidak ada	20	3,1
8. Apa boleh buat	45	7,0
9. Tidak tahu	5	0,8
10. Lainnya	3	0,5

Sumber : Data primer 2008

Responden menanggapi keberadaan pemulung baik secara positif sangat diperlukan, tetapi juga menyusahkan dan kadang-kadang suka mengambil barang selain sampah.

Untuk menangani masalah persampahan, pemerintah cq Departemen Pekerjaan Umum telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 21 Tahun 2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan yang prinsipnya meliputi :³⁾

- Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya,
- Mengedepankan peran dan partisipasi aktif masyarakat sebagai mitra dalam pengelolaan,
- Perkuatan kapasitas kelembagaan pengelolaan persampahan,
- Pemisahan badan/fungsi regulator dan operator,
- Pengembangan kemitraan dengan swasta,
- Peningkatan pelayanan untuk mencapai sasaran nasional,
- Penerapan prinsip pemulihan biaya secara bertahap
- Peningkatan efektifitas penegakan hukum.

Tabel 9. Pendapat Masyarakat Mengenai Kebijakan Pengelolaan Sampah

Keterangan	Jumlah	%
1. Pengumpulan & iuran sudah bagus	62	20,7
2. Perlu kebijakan pengurangan sampah	115	38,5
3. Pemerintah tidak bisa mem buat kebijakan yang baru	57	19,1
4. Tidak tahu	65	21,7

Sumber : Data primer 2008

Dari hasil wawancara dengan responden khususnya tentang kebijakan pemerintah dalam mengelola sampah, terlihat bahwa isu kebijakan pengurangan sampah masih menjadi perhatian utama, 20 persen lebih menyatakan bahwa sistem pengumpulan sampah dan penarikan iuran sudah bagus. Namun demikian 19 persen responden menyatakan pemerintah tidak bisa membuat kebijakan pengelolaan sampah yang baru untuk mengatasi permasalahan sampah saat ini seperti terlihat pada Tabel 9.

Paradigma baru dalam pengelolaan sampah yang bertumpu pada pengurangan atau reduksi sampah sebanyak mungkin dari sumbernya akan berdampak pada pengurangan jumlah sampah yang dibuang ke TPA. Salah satu cara untuk mengurangi sampah dari sumbernya tidak lain adalah memberdayakan masyarakat di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) untuk mengolah sampahnya dengan metode 4R, yaitu *reduce* (mengurangi), *reuse* (memakai kembali), *recycle* (mendaur ulang) dan *replace* (mengganti).⁵ Pada prinsipnya untuk menangani masalah kebersihan lingkungan khususnya sampah adalah menjadi tanggung jawab bersama, dilaksanakan secara terpadu dan melibatkan berbagai pihak serta masyarakat. Untuk itu dalam menjalankan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan perlu mendapatkan penekanan dan perhatian utama. Sampai saat ini, peran serta masyarakat dalam pengumpulan sampah yang dikoordinasi oleh RT/RW tetap berjalan baik, dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem pengumpulan serta pengangkutan sampah yang diselenggarakan oleh Dinas Kebersihan.

5. KESIMPULAN

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar,

kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir. Upaya menerapkan pengelolaan sampah yang baik perlu melibatkan masyarakat sehingga akan didapatkan efisiensi dan ketepatan dalam pengelolaan sampah. Masyarakat responden cenderung belum peduli secara berarti terhadap permasalahan persampahan. Bentuk peran serta atau kapasitas masyarakat secara efektif hingga saat ini masih berada di tahap membayar retribusi tepat pada waktunya, atau dengan kata lain masyarakat cenderung menyerahkan sepenuhnya pengelolaan sampah pada pemerintah. Dalam hal pemilahan sampah, pengelolaan persampahan pada tataran masyarakat belum menunjukkan adanya indikasi menuju kearah pemilahan. Untuk itu maka perlu pengaturan pengelolaan sampah khususnya :

- pemilahan sampah pada sumbernya,
- tentang perilaku masyarakat dari kebiasaan membuang sampah secara tercampur menjadi sudah terpilah,
- memotivasi masyarakat dalam membiasakan memilah sampah pada sumbernya,
- meningkatkan peran serta masyarakat dalam merumuskan konsep regulasi di bidang persampahan dalam pengelolaan sampah dengan sistem pilah.
- Merubah pola konsumtif yang boros sampah menjadi hemat sampah, sehingga upaya mengurangi sampah pada sumbernya dapat lebih efektif

DAFTAR PUSTAKA

1. Ansorudin Sidik, dkk. *Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, Pusat Pengkajian Inovasi Teknologi*, BPPT, 2006

2., *Ngurus Sampah Kok Repot, Prakarsa Rakyat*, Sinar Harapan, 12 Mei 2009
3., *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 21 Tahun 2006*, Departemen Pekerjaan Umum
4. Robert Puttnam, Christiaan Grootaert, Thierry Van Bastelaer, *The Role of Social Capital in Development : An Empirical Assessment*, Cambridge University Press, 2000
5. Ristie Dwi Handayani, *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Perkotaan Berbasis Masyarakat di Banjarsari Jakarta Selatan*, Central Library Institute Technology Bandung, 2008

JURNAL TEKNOLOGI LINGKUNGAN

ISSN : 1441 - 318X

Akreditasi :

Skep Kepala LIPI No. 1417/D/2006

Kpts Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 34/DIKTI/Kep/2003

Alamat Redaksi : Pusat Teknologi Lingkungan
Gedung BPPT II Lantai 20, Telp. 021 3169755 Faks. 021 3169760

Undangan Menulis

JTL, Jurnal Ilmiah Terakreditasi terbit 3X setahun memberi kesempatan bagi Anda untuk mempublikasikan temuan dan pemikiran yang berkaitan tentang penguasaan IPTEK bidang Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam.

Informasi Pendaftaran
dan Penerimaan Makalah:

Diyono

Gedung II Lantai 20 Telp. 3169755